

Implementasi Kebijakan Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Oleh Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya

Salsha Nur Fadilah¹, Endah Vestikowati², Dini Yuliani³

*^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Galuh*

¹salshanf123@gmail.com, ²vestiunigal@gmail.com, ³diniasyari16@gmail.com

Dikirim: 13 Juni 2022 Direvisi: 2 November 2022 Diterima: 5 Desember 2022

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kecenderungan perubahan global seperti peradaban masyarakat, revolusi digital dan fenomena abad yang semakin kreatif memberi dampak pada perlunya penguatan pendidikan karakter. Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan suatu bangsa tergantung pada keberhasilan pembangunan sumber dayanya. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195) yang menyebutkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SMPN 10 Kota Tasikmalaya. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, data berhasil diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMPN 10 Kota Tasikmalaya secara umum sudah berjalan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan kegiatan atau program yang sudah berjalan secara konsisten melalui pembiasaan-pembiasaan yang telah disusun dan disetujui bersama dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang positif dalam rangka membentuk dan meningkatkan karakter yang baik pada peserta didik sesuai dengan visi utama yang digagas sekolah yaitu Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya Lingkungan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Karakter

Abstract

This research is motivated by the situation of moral crisis that affects almost all levels of Indonesian society, showing that education taught in schools and universities, has less impact on changes in the behavior of Indonesian society. This research is important to do because the success of a nation depends on the success of its resource development. This research uses qualitative descriptive research methods with a case study approach at SMPN 10 Tasikmalaya City. The data collection techniques carried out are observation, interviews, and documentation. The results of this study concluded that the implementation of the Character Education Strengthening Policy (PPK) at SMPN 10 Tasikmalaya City

in general has been running optimally. This is shown from the implementation of activities or programs that have been running consistently through habituations that have been prepared and approved together by instilling positive character values in order to form and improve good character in students in accordance with the main vision initiated by the school, namely Excellence, Character, and Environmental Culture.

Kata kunci: *Implementation, Policy, Character Education*

PENDAHULUAN

Krisis moral yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta realita yang terjadi terhadap dunia pendidikan pada jaman sekarang menghadapi banyak tantangan yang begitu kompleks, utamanya di tengah arus globalisasi yang semakin hari dampak yang ditimbulkannya semakin kuat bahkan dapat mengikis beberapa budaya lama yang telah di terapkan. Setiap manusia pada dasarnya dilahirkan dengan memiliki potensi untuk berkarakter sesuai dengan fitrah penciptaannya masing-masing, akan tetapi dalam kehidupannya kemudian memerlukan proses yang cukup panjang untuk pembentukan karakter. Sebagaimana dikutip oleh (Helga, 2012) Thomas Lickona menjelaskan bahwa karakter terdiri atas tiga bagian yang saling terkait, yaitu: Pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*) dan perilaku bermoral (*moral behavior*). Artinya, manusia yang berkarakter adalah individu yang mengetahui tentang kebaikan (*knowing the good*), menginginkan dan mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Melalui pengasuhan dan pendidikan yang diterapkan sejak usia dini, diharapkan ketika tumbuh menjadi dewasa ia akan menjadi pribadi yang memiliki karakter baik. Pendidikan karakter yang mulai ditanamkan sejak dini dan secara terus menerus/berkelanjutan adalah sebuah usaha aktif untuk membentuk dan membangun kebiasaan dan perilaku yang baik.

Pengembangan karakter adalah sebuah proses berkelanjutan (*never ending process*) selama hidup manusia dan selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap eksis. Karakter merupakan suatu fondasi bangsa yang keberadaannya sangat penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Karena kemajuan dan kemunduran suatu bangsa sangat bergantung terhadap potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi dan demi mencapai suatu kemajuan, Bangsa Indonesia perlu melakukan penguatan karakter terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Salah satunya dengan dilakukannya penguatan karakter melalui proses Pendidikan. (Parkay & Beverly, 1998) dalam (Ningsih, 2015) mengemukakan ‘kaitan antara pembelajaran nilai dan (penalaran) moral dengan pendidikan karakter sebagai berikut: “*One approach to teaching values and moral reasoning is known as character education, that stresses a development of students good character*”. Yang artinya: salah satu pendekatan untuk mengajarkan nilai-nilai dan penalaran moral dikenal sebagai pendidikan karakter, yang menekankan pada pengembangan dan penguatan karakter siswa yang baik. Melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter merupakan tujuan utama pendidikan. Seperti dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 2 tentang Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya adalah: “Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab”. Keberadaan dan

pentingnya pendidikan karakter sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, bukanlah sesuatu yang hadir tanpa dasar dan semena-mena. Mendasar pada kesempatan para founding fathers ketika mendirikan Bangsa Indonesia, maka dasar filosofinya adalah Pancasila. Tujuan utamanya ingin membentuk generasi penerus Bangsa Indonesia yang ber Pancasila, yang berarti generasi penerus yang memiliki dan menghayati nilai yang terkandung dalam ke lima sila pada Pancasila serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan untuk membentuk moral (moral education), atau pendidikan untuk mengembangkan karakter (character education), dinilai sebagai solusi utama dalam upaya memperbaiki karakter bibit-bibit penerus generasi bangsa. Dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195) yang menyebutkan bahwa: “Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)”. Peraturan Presiden tersebut mengemukakan bahwa PPK adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pendidikan sebagai upaya untuk memperkuat pembentukan karakter generasi penerus bangsa yang unggul dan berkualitas melalui pelaksanaan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang dilakukan SMPN 10 Kota Tasikmalaya, di temukan beberapa permasalahan yang menyangkut pendidikan karakter diantaranya: (1) Banyaknya siswa-siswi yang terbawa dampak negatif arus globalisasi dan modernisasi sehingga memiliki motivasi, tanggung jawab dan kesadaran yang rendah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Ditandai dengan perilaku siswa yang cenderung ketegantungan terhadap gadget, penyalahgunaan alokasi bantuan kuota belajar dari pemerintah. (2) Banyaknya siswa-siswi yang terbawa dampak negatif arus globalisasi dan modernisasi sehingga memiliki motivasi, tanggung jawab dan kesadaran yang rendah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Ditandai dengan perilaku siswa yang cenderung ketegantungan terhadap gadget, penyalahgunaan alokasi bantuan kuota belajar dari pemerintah. (3) Banyaknya siswa-siswi yang kurang memahami urgensi Pendidikan karakter sehingga budaya dan karakter bangsa yang telah lama diterapkan semakin memudar.

Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas sangat berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dengan demikian, Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini merupakan salah satu bidang kajian Ilmu Pemerintahan, hal ini sejalan dengan pendapat (Syafie, 2011) yang mengatakan bahwa “Pemerintahan adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), penataan (legislatif), kepemimpinan dan pun koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan pemerintahnya dalam segala peristiwa & fenomena pemerintahan”. Oleh karena itu maka pendekatan teori yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini menggunakan kaidah-kaidah ilmu pemerintahan.

Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya merupakan kajian ilmu pemerintahan. Dimana SMP 10 Kota Tasikmalaya ini

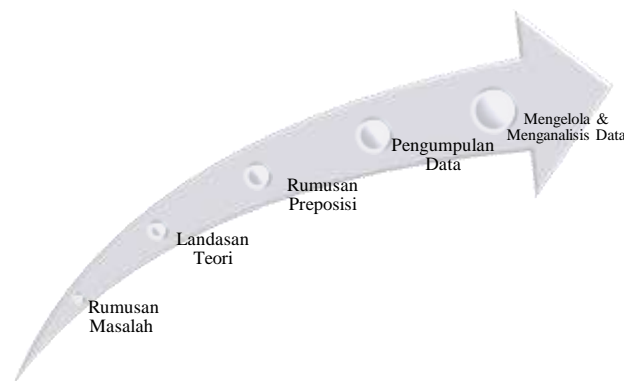
merupakan salah satu satuan pendidikan yang memiliki fungsi salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan. SMPN Negeri 10 Kota Tasikmalaya yang merupakan bagian dari satuan pendidikan tentunya memiliki peran penting dalam pengimplementasian pendidikan karakter, hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar krisis moral yang terjadi khususnya pada siswa dapat menurun.

Berdasarkan penelitian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul “Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya”. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Mei 2022 dengan lokus penelitian di SMPN 10 Kota Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Wiratanuningrat N0. 12 Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu yang memahami dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter. Adapun subjek-subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini, antara lain Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru Bimbingan Konseling, perwakilan siswa dan orang tua siswa SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya

Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun dan menyelesaikan permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan alur desain penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Desain Penelitian

Sumber: Peneliti, 2022

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumen (catatan atau arsip). Wawancara, observasi nonpartisipan dan kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian. Data yang terkumpul tercatat dalam catatan lapangan. Teknik Analisis Data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, yang juga dikenal dengan analisis interaktif. Dalam model analisis data (Miles dan Huberman, 1984) terdapat empat langkah, antara lain: pengumpulan data, reduksi Data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMPN 10 Kota Tasikmalaya, penelitian ini menggunakan teori yang mengacu pada 4 hal pokok yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Adapun perolehan hasil berdasarkan data primer disajikan dengan membahas masing-masing dimensi berikut ini.

a. Komunikasi

Pada aspek komunikasi, implementasi PPK di SMPN 10 Kota Tasikmalaya sudah dilakukan dengan baik dan jelas. Menurut Kepala Sekolah yang merupakan salah satu informan, menyampaikan bahwa: *“Untuk penyampaian informasi, pesan dan lain sebagainya, telah dilakukan dengan baik dan jelas antara guru, murid, orang tua murid dan berbagai pihak yang terkait. Baik secara langsung melalui rapat atau secara udara melalui aplikasi whatsapp”*.

Wakasek Kesiswaan selaku informan lainnya juga menambahkan bahwasannya *“Proses penyampaian informasi yang sudah cukup jelas, terlebih adanya aplikasi whatsapp grup yang memudahkan penyampaian informasi mengenai kegiatan siswa atau informasi seputar sekolah dapat tersampaikan secara cepat dimanapun dan kapanpun.”*

Dari pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian pesan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan di SMPN 10 Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan dengan baik dan jelas. Contohnya penyampaian informasi kegiatan siswa kepada orang tua siswa dilakukan melalui rapat rutin dengan orang tua peserta didik secara langsung atau secara tidak langsung dengan melalui whatsapp group per-kelas atau whatsapp group orang tua peserta didik. Dari informasi yang didapatkan dari informan juga, menunjukkan sudah adanya koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak luar yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter ini. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Guru BK selaku salah satu informan, yang menyapaikan bahwa

“...kami juga melakukan kerja sama yang baik dengan pihak eksternal atau dari luar seperti salah satunya dengan pihak kapolsek yang dihadirkan ketika upacara bendera untuk pembinaan karakter dan mental anak, menghadirkan ustadz dari luar sebagai pengisi di acara tausiah yang secara rutin dilakukan dihari Jum'at.”

Menurut informan lainnya selaku Wakasek Kurikulum juga menambahkan bahwa

“Proses koordinasi dilakukan secara continue atau berkesinambungan, waktu tertentu, dijadwalkan atau sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan program atau acara yang akan berlangsung. Proses koordinasi dilakukan secara kondisional oleh penanggung jawab sesuai dengan kepentingan yang akan berlangsung...”

Pada aspek komunikasi ini, proses komunikasi dan koordinasi telah berjalan. Namun demikian, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mendapatkan bahwa beberapa peserta didik ada yang belum memiliki handphone. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghalangi keefektifan proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak sekolah, karena pesan atau informasi apapun dari pihak sekolah selalu tersampaikan melalui temannya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan yang menyebutkan bahwa *“...Meskipun ada beberapa murid yang tidak memiliki HP, tetapi informasi selalu tersampaikan dari temannya...”*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa proses komunikasi dan koordinasi sudah berjalan dengan baik. Hal itu menyebabkan pelaksanaan program tak ada hambatan yang berarti. Meskipun adanya pandemi, berbagai informasi yang telah diberikan pihak sekolah baik secara langsung atau melalui udara berjalan dengan baik. Pelaksanaan koordinasi diantara implementor kebijakan dengan beberapa instansi atau pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini juga sudah berjalan, seperti halnya dengan dengan polsek dan polres, kemudian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Puskesmas, Perpustakaan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan partner kerjasama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Proses koordinasi yang dilakukan, melalui pengamatan program pembiasaan juga, diketahui bahwa selama ini SMPN 10 Kota Tasikmalaya telah melakukan koordinasi dengan menghadirkan ustadz dari luar sebagai penceramah di acara tausiah yang secara rutin dilakukan dihari Jum'at sebagai upaya pembentukan karakter religius siswa-siswi dengan menyampaikan materi tausiah yang berkenaan dengan karakter baik sesuai dengan ajaran agama.



Gambar 2. Program Pembiasaan Tausiah Jum'at
Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Dalam proses komunikasi kebijakan, secara teoritis terdapat tiga hal penting, antara lain (1) transmisi, (2) konsistensi, dan (3) kejelasan. Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, maka pelaksana kebijakan harus mengetahui secara pasti mengenai apa yang harus mereka lakukan dan mereka sampaikan kepada sasaran agar dapat dipahami.

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMPN 10 Tasikmalaya ini, secara umum memiliki jumlah tenaga pendidik yang sudah memenuhi kebutuhan dan memadai untuk melakukan proses mengajar di kelas, di ranah ekstrakurikuler ataupun membimbing kegiatan untuk meningkatkan karakter siswa. Sesuai yang disampaikan oleh salah satu informan selaku Kepala Sekolah SMPN 10 Kota Tasikmalaya, mengemukakan bahwa:

“Jumlah pelaksana kebijakan oleh guru-guru sebagai tenaga pendidik untuk penguatan pendidikan karakter sudah memenuhi kebutuhan dan memadai untuk melakukan proses mengajar di kelas, di ranah ekstrakurikuler ataupun membimbing kegiatan untuk meningkatkan karakter siswa.”

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa jumlah guru yang mengajar dikelas sudah memadai dan terpenuhi. Meskipun banyak sekali kegiatan atau program dalam pengimplementasian kebijakan penguatan pendidikan karakter ini, jumlah pelaksananya sudah

cukup terpenuhi dan sudah cukup memadai untuk melayani siswa dengan baik, karena pelaksana kebijakan utamanya guru-guru ataupun staf yang bekerja, mereka memiliki kesadaran untuk saling *backup* atau saling membantu meskipun diluar tupoksinya. Adapun jumlah guru yang dilihat berdasarkan usianya. Berikut diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Jumlah Guru Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	Kurang dari 30 Tahun	4
2	31 – 35 Tahun	9
3	36 – 40 Tahun	4
4	41 – 45 Tahun	1
5	46 – 50 Tahun	2
6	51 – 55 Tahun	15
7	Lebih dari 55 Tahun	17
Total		52

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Selain jumlah pelaksana yang sudah memadai, berdasarkan wawancara dilakukan, didapatkan bahwasannya kemampuan dan keahlian pelaksana kebijakan secara umum sudah mampu, para pelaksana kebijakan sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selain dikarenakan sudah memiliki latar pendidikan yang bagus, mereka juga sudah dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan dan workshop, utamanya terkait pendidikan karakter. Sesuai dengan yang disampaikan salah satu informan selaku Wakasek Kurikulum yang mengemukakan bahwa “*Secara umum guru-guru sudah mampu dan mumpuni dalam melaksanakan kebijakan ini karena disaat masa perkuliahan juga sudah dibekali ilmu mengenai psikologi pendidikan, sering melaksanakan pelatihan-pelatihan dan workshop*”. Disisi lain, salah satu informan selaku siswa yang menyatakan bahwa “*... tetapi dalam beberapa kesempatan proyek OSIS yang juga bagian dari kegiatan peningkatan karakter siswa, terkadang ada keterlambatan dalam proses perizinan dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama*.” Demikian pula dengan salah satu informan lainnya selaku siswi yang menyatakan bahwa “*...Dalam beberapa kesempatan mereka (guru-guru) sudah cukup cepat menanggapi siswa-siswinya. Meskipun terkadang suka ada keterlambatan perizinan dalam membantu pelaksanaan program kerja OSIS atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan karakter ini*”. Kedua informan tersebut menyatakan bahwa pelaksana kebijakan sudah cukup mumpuni tapi dalam beberapa kesempatan terkadang ada keterlambatan dalam proses perizinan dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hasil observasi ke lapangan ditemukan bahwasannya pihak sekolah sudah memiliki *resources* yang ahli dan mumpuni telah menjalankan kebijakan PPK secara optimal. Adapun data mengenai daftar tingkat pendidikan dan jabatan guru berdasarkan jenis kelamin serta jumlah guru berdasarkan status sertifikasi. Berikut diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Daftar Tingkat Pendidikan & Jabatan Guru Berdasarkan Jenis Kelamin
di SMPN 10 Kota Tasikmalaya

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan Guru						Jumlah
		Guru Madya		Guru Muda		Guru Pertama		
		P	L	P	L	P	L	
1	S3	-	-	-	-	-	-	
2	S2	6	3	1	-	-	-	10
3	S1	20	14	1	2	2	3	42
4	D4	-	-	-	-	-	-	
5	D3	-	-	-	-	-	-	
6	D2	-	-	-	-	-	-	
7	D1	-	-	-	-	-	-	
8	SMA/Sederajat	-	-	-	-	-	-	
Total		52 Guru						

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 3.
Jumlah Guru Berdasarkan Status Sertifikasi

No	Status Sertifikasi	Jumlah
1	Sudah	39
2	Belum	13
Jumlah		52

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Guru-guru yang bertugas telah terverifikasi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni dan di dominasi dengan guru yang telah mendapatkan sertifikasi. Selain mengadakan pelatihan atau workshop bagi pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakannya, ada penyaluran dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan atau program pendidikan karakter lainnya. Dana ini disalurkan dari pusat yaitu melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang penggunaannya disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang sudah disepakati bersama.

Adapun sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan PPK, yang secara umum informan menyampaikan bahwa sarana dan prasarana yang ada di SMPN 10 Kota Tasikmalaya sudah cukup menunjang dan memadai untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter baik melalui pembelajaran dikelas atau kegiatan diluar kelas seperti ekstrakurikuler. Sesuai yang disampaikan oleh Wakasek Kurikulum selaku salah satu informan yang mengemukakan bahwa:

“Secara umum fasilitas memadai walaupun ada beberapa yang masih kurang. Contoh ruang kelas yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran dikelas, fasilitas ekstrakurikuler seperti adanya lapangan yang memadai,

untuk karakter religius adanya fasilitas mesjid, untuk pengembangan skil IT adanya fasilitas Lab Komputer, fasilitas perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan adanya kantin kejujuran sebagai pembentukan karakter jujur siswa-siswi”.

Namun demikian, salah satu informan selaku Siswa SMPN 10 Kota Tasikmalaya yang menyebutkan bahwa *”...ada beberapa fasilitas penunjang yang sebenarnya sangat baik dimanfaatkan untuk meningkatkan karakter siswa yaitu papan pengumuman yang kurang atau jarang diisi. Padahal papan tersebut sangat bagus jika diisi dengan edukasi yang bisa meningkatkan karakter baik siswa”.*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa sarana dan prasarana sudah benar-benar menunjang dan memadai. Adapun sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan penguatan pendidikan karakter (PPK) ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.
Keadaan Sarana dan Prasarana di SMPN 10 Kota Tasikmalaya

Sarana dan Prasarana	Kondisi				Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
Ruang Kelas	14	19	-	-	33
Laboratorium:					
- IPA	1	-	-	-	22
- Bahasa	-	-	-	-	
- IPS	-	-	-	-	
- Komputer	-	1	-	-	
Perpustakaan	-	1	-	-	1
Sanitasi:					
- Guru	-	2	-	-	6
- Siswa-siswi	1	3	-	-	
Lapangan basket & volly	1	-	-	-	1
Lapangan Sepak Bola	1	-	-	-	1
Mesjid	1	-	-	-	1
Total					60

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter baik melalui pembelajaran dikelas yang dilihat dari fasilitas ruang kelas yang menunjang pembelajaran audio visual, serta kegiatan diluar kelas seperti ekstrakurikuler yang di dukung fasilitas lapangan yang cukup luas, fasilitas mesjid yang representatif untuk kegiatan kerohanian dalam upaya peningkatan karakter religius siswa, fasilitas perpustakaan untuk menunjang peningkatan literasi siswa. Namun demikian mengenai papan informasi atau majalah dinding (mading sekolah) yang kurang berjalan dengan efektif karena kurangnya partisipan atau orang yang manage papan informasi tersebut.

c. Disposisi

Pada aspek disposisi, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa para pelaksana kebijakan sudah patuh serta disiplin dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu informan selaku Wakasek Kurikulum yang menyampaikan bahwa:

“Adanya penurunan kepatuhan karena kondisi pandemi, sebelum adanya pandemi kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan ini sangatlah bagus karena baik siswa-siswi dan guru ada semua masuk sekolah sehingga dapat terawasi dan terkondisikan dengan mudah. Sekarang mulai merintis lagi, harus adaptasi lagi, beberapa pelaksana kebijakan khususnya guru memiliki persepsi yang permisif terhadap pelaksanaan pendidikan karakter ini.”

Meski demikian, implementasi kebijakan ini secara umum sudah berjalan dengan baik. Mengenai perbedaan perspektif dan tanggapan sikap guru yang terlalu permisif dapat dicari solusinya melalui musyawarah untuk mencari titik tengah. Lain halnya dengan salah satu informan lain selaku Orang tua siswa yang kurang mengetahui secara pasti kepatuhan dari para pelaksana kebijakan karena tidak berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter ini. Sedangkan mengenai komitmen dan tanggung jawab dari pelaksana kebijakan menurut seluruh informan secara umum mereka sudah melakukan apa yang harusnya dikerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun informan selaku Guru Bk dan Wakasek Kurikulum menegaskan bahwa *“Meskipun setiap pelaksana tidak bisa dibidang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang setara, tapi over all mereka sudah cukup bagus. Hal yang menarik disini selaku guru pelajaran, wakasek ataupun staff sekolah lainnya itu selalu saling backup ketika ada hal-hal yang perlu dibantu, jadi mereka bekerja tidak hanya berdasarkan jabatan struktural saja, tetapi dalam pelaksanaan teknisnya kami bergerak bersama-sama”*.

Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik bahkan mencapai kesempurnaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Disposisi dari implementor mungkin akan menjadi penghambat terhadap suatu implementasi kebijakan, jika para pelaksana benar-benar tidak memahami secara tepat substansi dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa para pelaksana kebijakan memiliki kepatuhan yang cukup bagus karena baik siswa-siswi dan guru ada semua masuk sekolah sehingga dapat terawasi dan terkondisikan dengan mudah. Tetapi disaat kondisi pandemi kepatuhan pelaksana mengalami penurunan khususnya beberapa guru yang memaklumkan siswa dalam beberapa situasi, serta kepatuhan beberapa siswa yang ikut menurun karena kurang terawasinya secara langsung oleh pihak sekolah. Mengenai tanggung jawab para pelaksana pun diketahui bahwa hampir semuanya sudah memiliki komitmen dan tanggung jawab yang baik dan selalu secara berkesinambungan melaksanakan penerapan pendidikan karakter terhadap siswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Adapun hal menarik yang menarik ditemukan yaitu para pelaksana kebijakan termasuk guru pelajaran, wakasek ataupun staf sekolah lainnya itu selalu saling *backup* ketika ada hal-hal yang perlu dibantu, mereka bekerja tidak hanya berdasarkan jabatan struktural saja, tetapi dalam pelaksanaan teknisnya bergerak bersama-sama.

d. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan PPK di SMPN 10 Kota Tasikmalaya, sekolah sudah memiliki struktur organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai. Mengenai kerjasama dengan pihak lain, pihak SMPN 10 Kota Tasikmalaya sudah melakukan kerja sama yang baik secara internal maupun eksternal, sesuai yang disampaikan oleh salah satu informan, selaku Guru BK mengemukakan bahwa:

“Kerja sama yang sudah cukup baik di lingkup internal maupun eksternal. Dalam struktur sendiri ada garis komando yang mana Kepala sekolah sebagai jabatan tertinggi secara struktural memberikan arahan, perintah dan sebagainya kepada jabatan yang ada dibawahnya dengan berkoordinasi dengan wakasek, guru BK dan lain sebagainya”.

Menurut Hogwood dan Gunn (1984:199-206) dalam Kusnandar, Ishak (2019:92-93), adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan agar berjalan dengan sempurna dan sesuai dengan yang telah direncanakan antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditunjukkan atau dilaksanakan untuk internal pemerintah saja, akan tetapi ditunjukkan dan harus dilaksanakan juga oleh seluruh lapisan masyarakat terutama yang ada dilingkungan sekitarnya.

Mengenai tugas pokok dan fungsi dari para pelaksana kebijakan, secara umum sudah menjalankan semua kebijakan dan ketentuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh salah satu informan selaku orang tua siswa, yang meskipun tidak secara langsung berada di sekolah tetapi beliau merasakannya disaat penyampaian informasi yang dilakukan secara cepat dan tanggap serta pelaksanaan rapat orang tua yang sudah dilakukan secara rutin. Struktur birokrasi yang dibuat sudah sesuai sehingga menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada pada implementasi kebijakan PPK secara mekanisme sudah dipahami dengan baik dan dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMPN 10 Kota Tasikmalaya secara umum sudah berjalan secara optimal sesuai dengan teori yang

dikemukakan oleh Edwards III (1980:10-11), dalam Kusnandar, Ishak (2019). Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar jawaban informan menyatakan telah dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi bahwa para pelaksana kebijakan dari berbagai leading sector yang telah dibagi, dalam pengimplementasian kebijakan penguatan pendidikan karakter di SMPN 10 Kota Tasikmalaya secara umum telah dilaksanakan dengan optimal.

Optimalnya Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter (PPK) di SMPN 10 Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan atau program yang sudah berjalan secara konsisten melalui pembiasaan-pembiasaan yang telah disusun dan disetujui bersama dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang positif dalam rangka membentuk dan meningkatkan karakter yang baik pada peserta didik sesuai dengan visi utama yang digagas sekolah yaitu Unggul, Berkarakter, dan Berbudaya Lingkungan.

Selanjutnya sudah optimalnya dimensi komunikasi yang dibangun meskipun terhalang oleh pandemi tetapi pelaksanaan penyampaian informasi atau pesan dilakukan menggunakan alternatif secara online melalui *whatsapp group*. Selain itu proses koordinasi telah dilakukan dengan beberapa instansi atau lembaga yang terkait sesuai dengan kebutuhan pencapaian yang ingin dituju. Dimensi lainnya yaitu mengenai sumber daya yang secara keseluruhan sudah memenuhi dan ahli dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian dimensi sikap dari para pelaksana yang sudah patuh dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya.

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMPN 10 Kota Tasikmalaya sudah cukup berhasil dan optimal. Dari hasil dan pembahasan serta kesimpulan, beberapa saran penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan di SMPN 10 Kota Tasikmalaya dengan cara diberikan arahan dan forum yang membahas secara rutin mengenai urgensi dari kegiatan-kegiatan peningkatan karakter pada siswa, sehingga pelaksanaan yang mendukung penguatan pendidikan karakter dapat terealisasi lebih optimal.
2. Pembentukan sebuah wadah kreatif untuk mengisi papan informasi atau majalah dinding (Mading) dengan informasi atau edukasi mengenai pendidikan karakter.
3. Peningkatan kemampuan sumber daya pelaksana kebijakan dengan cara pembentukan pelaksana kebijakan secara struktural disetiap pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter.
4. Meningkatkan proses komunikasi dan komitmen secara intensif dengan melakukan sosialisasi atau pembekalan rutin kepada orang tua siswa mengenai penguatan pendidikan karakter agar penanaman nilai karakter di lingkungan keluarga sejalan dengan proses implementasi pendidikan karakter di sekolah.

REFERENSI

Amazona, Rosalin Helga. (2016). "Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Hidayatullah Yogyakarta". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
https://eprints.uny.ac.id/46143/1/skripsi_rosalin%20helga%20amazona_11511241001.pdf

Kusnandar, Ishak. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Rev. ed)*. Bandung: Multazam

Ningsih, Tutuk. (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter*. Purwokerto: STAIN Press.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195)

Sugiyono. (2013.) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Syafie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan (Rev. ed)*. Bandung: Mandar Maju.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada SMPN 10 Kota Tasikmalaya yang telah memberikan izin dan membantu memberikan data maupun informasi dengan responsif dan terbuka untuk penelitian ini.